INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN: EVALUASI KEBIJAKAN

Mengapa Kebijakan yang Baik Penting?



Hatta Rajasa pada Pidato penganugerahan Doktor Kehormatan dari ITB, 25 November 2019



Negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan unggul. Kebijakan publik menentukan

kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya".

Mengapa kebijakan publik penting? Kebijakan publik yang gagal, membawa negara dalam krisis."

Tantangan Indonesia dlm Indeks Global



Global Competitiveness
Index - Special Edition 2020

Indikator 'Public Institutions'

Rank 18 (Skor 58,8)

dari 37 Negara

Area Perbaikan:

- Penguatan kelembagaan;
- Kebijakan dan regulasi bervisi jangka panjang;
- Inisiasi framework untuk transformasi digital.



Global Talent Competitiveness Index 2020

> Rank 65 (Skor 41,8) dari 132 Negara

Area Perbaikan:

- Keterampilan dan pengetahuan global (global knowledge);
- Keterampilan profesional (professional skill);
- · Kualitas riset dan inovasi.



Government
Effectiveness Index
2019

Rank 73 (Skor 60,1) dari 193 Negara

Area Perbaikan:

- Kualitas SDM sektor publik;
- Kualitas pelayanan dan perumusan kebijakan publik:
- Kredibilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan publik.

Beragam Masalah dalam Kebijakan

Konflik

Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya

Inkonsisten

Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya

Multitafsir

Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa serta sistematika yang tidak jelas.

Tidak operasional Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

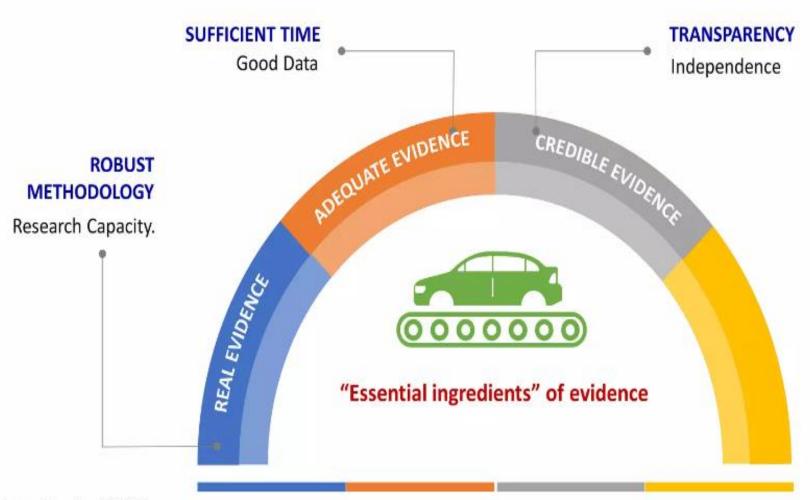
KEBIJAKAN
YANG
BERBASIS
BUKTI
(masih kurang)

Sumber: Bappenas (2015)

Sejarah EBP

- Terdapat proposisi bahwa pengetahuan yang handal adalah instrumen untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas. Ilmu sosial (ekonomi, sosiologi, politik, psikologi dll) berkembang pesat dan ilmuwan sosial terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi kebijakan.
- Namun, hasilnya masih belum optimal karena penelitian sosial yang tidak memadai, serta kapasitas implementasi dan koordinasi yang buruk dari lembaga pemerintah. Itulah sebabnya, penggunaan data kuantitatif dan metode eksperimental sangat dianjurkan sebagai sarana untuk memberikan bukti (evidence) yang lebih tepat dan andal bagi para pembuat keputusan.

Karakteristik Evidence yang Baik



Court et.al. (2006: 33)

- Availability,
- Accuracy,
- Objectivity,
- Credibility,
- Generalizability,
- Relevance.

Sumber: Banks, 2009

Urgensi Kebijakan Berbasis Bukti



Kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk mencegah kegagalan kebijakan (policy failures) dan munculnya konsekuensi yang tidak diinginkan, yang biasanya terjadi karena 2 hal:







ANALISIS YANG TIDAK SELESAI (TIDAK DILAKUKAN)

Unintended Consequences of Policy

Kajian kebijakan diperlukan untuk menghindari atau meminimalisir "dampak tak termaksud" atau konsekuensi yang tidak direncanakan (konsep ini salah satunya diperkenalkan oleh Robet K.

Morten dalam tulisannya berjudul The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action).

Eastern Economic Journal (2021) 47:206-226 https://doi.org/10.1057/s41302-021-00187-7

ORIGINAL ARTICLE



Unintended Consequences: Ambiguity Neglect and Policy Ineffectiveness

Lorán Chollete¹ · Sharon G. Harrison²

Published online: 1 February 2021 © EEA 2021 Pada tahun 1989, Pemda Mexico City menerapkan kebijakan pengendalian polusi udara dengan melarang para pengemudi mengendarai **satu hari kerja/minggu**. Pelanggarnya dikenakan denda besar.

Ternyata, banyak orang membeli mobil yang lain — pada umumnya mobil bekas dengan emisi tinggi — hanya untuk menghindari dari pelanggaran terhadap kebijakan tsb.

Dalam hal ini, keputusan pengemudi untuk menambah mobil justru **menimbulkan eksternalitas negatif** berupa polusi udara yang semakin parah.

Idealita vs Realita Penyusunan Kebijakan



Policy making is based on EVIDENCE



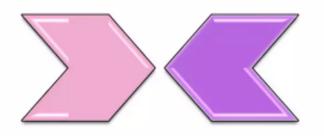
Realita

Policy making is based on:

- Intuition
- Common sense
- Experience
- Ideology
- Public opinion
- Political interests that can swing from one end of the spectrum to the other for the sake of rent seeking.

Relasi Policy Analyst - Policy Maker

Policy Analysts



Policy Makers

- Keengganan pengambil kebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan;
- Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki kapasitas dan idealisme melakukan reformasi kebijakan;
 - Kedekatan dengan birokrasi akan mendistorsi idealisme & visi jangka panjang darl kerja akademis.



- Peneliti kebijakan tidak mengerti detil persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro & prosedur administrasi yang renik;
- Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu akademis, normatif, dan abstrak.

Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktek, Jakarta: LP3ES

The policy process in context

- What evidence is needed and / or available to test the "real world" problem?
- · How can evidence best be presented?

POLITICAL CONTEXT

How does the problem / policy fit with government manifesto / priorities?

- · What policy conflict / priorities need to be resolved?
- Is a cross-outling approach needed?
 - Who else within government needs to be involved and how?
- What is the impact of devolution?
- What is the role of the EU?
- How should work be organised?
- How should front-line staff be involved?

Understanding the problem

POLICY

PROCESS

Putting solutions into effect

What training and support for front-line staff is needed?

- · What sort of crosscutting intervention is required (if any)?
- What is the impact on other existing and developing policies? What are the costs / benefits of different options?
- What evaluation systems and performance targets are needed?
- What are the alternatives to legislation &

- · What are the desired policy outcomes?
- . Which re the most effective outputs for achieving these outcomes?
- Who are the key stakeholders and how should they be involved?
 - What are the needs & views of those the policy seeks to influence / affect?
- . How and when should key political representatives be involved?

Are Ministers

signed up?

What is the

strategy for

presenting

policy?

 What have the experiences of other countries been?

· What evidence is,

and useful?

available, relevant

- What are the risks to the policy and how can they be managed?
- · What is the impact of possible solutions on equal opportunities. business, women, environment etc.



Saya ingin mengakhiri mengambil kebijakan yang berwarna ideologi.

Kebijakan publik dibawah pemerintahan saya **haruslah** yang problem solving. Ia harus evidence-based policy. Ia harus kebijakan yang berdasar pada bukti, pada data, dan pada riset.

Saya meyakini, **kebijakan** publik akan lebih melayani kepentingan masyarakat jika ia bersandar pada prosedur ilmiah, bukan giringan ideologi.

Tony Blair (PM Inggris, 2 Mei 1997 - 27 Juni 2007)

Sumber: UK Cabinet Office, 1999, Professional policy making for the twenty first century. London.

ORGANIS-ATIONAL CONTEXT

How / when

should policy

effectiveness &

contribution to

objectives be

What needs

to happen to

ensure policy

becomes self

sustaining?

corporate

reviewed?

Testing success and making it

- · What IS changes are
- Who needs to be told what, when and how?
- · How can stakeholders be kept committed and involved?
- What are the quick wins?

WIDER PUBLIC

CONTEXT

Epilog

- IKK hanyalah instrumen untuk membantu memperbaiki tata kelola atau business proses pembuatan kebijakan. Faktor yang lebih dominan dalam menentukan kualitas kebijakan adalah integritas dan komitmen pembuat kebijakan dalam mendedikasikan kebijakan bagi kemajuan institusi dan negerinya.
- IKK bertujuan membiasakan (habituasi) praktik baik dalam perumusan kebijakan publik.
- Skor IKK yang rendah pada tahun tertentu, bukan cerita akhir tentang sebuah instansi/daerah. Pengalaman 2021 harus menjadi lesson learned untuk membuktikan kualitas kebijakan yang jauh lebih baik pada 2023.
- Kualitas kebijakan bukanlah tujuan akhir dari pengukuran IKK. Tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa terhadap bangsa lain, sekaligus mewujudkan cita-cita nasional dalam UUD 1945.
- Keberadaan JF Analis Kebijakan perlu didayagunakan untuk mengawal pelaksanaan IKK di tingkat instansi, sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan secara progresif.

1. MEMBANGUN KUALITAS KEBIJAKAN

Hasil kajian LAN menjadi diskusi di berbagai media dan ruang-ruang publik

Khazanah Pengetahuan Hasil kajian LAN menjadi bahan referensi dalam pembuatan bahan ajar di berbagai lembaga diklat atau di perguruan tinggi, serta menjadi bacaan bagi birokrat, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Hasil kajian LAN menjadi menjadi salah satu telaahan akademis untuk issu-issu kebijakan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah, dalam bentuk policy paper & policy brief.

Bahan Formulasi Kebijakan

Diskursus

Publik

SDM Analis Kebijakan Keberadaan Analis Kebijakan terus diperkuat baik secara kualitas maupun kecukupan formasinya.

Framework IKK

IKK

PERENCANAAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Instrumen IKK terdiri dari:

2 Dimensi

4 Sub Dimensi

13 Indikator

39 Pertanyaan

Agenda Setting Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan

Pengukuran agenda setting kebijakan terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.

Pengukuran
implementasi
kebijakan dengan
berfokus pada
dimensi
pengorganisasian,
komunikasi
kebijakan dan
monitoring
kebijakan.

Pengukuran
evaluasi kebijakan
dengan melihat
pada efektivitas,
efisiensi, dampak
dan kemanfaatan,
penerimaan dan
responsivitas
kebijakan.



Pendekatan Evaluasi (3)

William N Dunn Teknik Evaluasi (16)

		п	ī		
11:	ø	L	Е	1	а

Three Approaches to Evaluation

Approach	Aims	Assumptions	Major Forms
Pseudo-evaluation	Use descriptive methods to produce reliable and valid information about policy outcomes	Measures of worth or value are self-evident or uncontroversial	Social experimentation Social systems accounting Social auditing Research and practice synthesis
Formal evaluation	Use descriptive methods to produce reliable and valid information about policy outcomes that have been formally announced as policy-program objectives	Formally announced goals and objectives of policymakers and administrators are appropriate measures of worth or value	Developmental evaluation Experimental evaluation Retrospective process evaluation Retrospective outcome evaluation
Decision-theoretic evaluation	Use descriptive methods to produce reliable and valid information about policy outcomes that are explicitly valued by multiple stakeholders	Formally announced as well as latent goals and objectives of stakeholders are appropriate measures of worth or value	Evaluability assessment Multiattribute utility analysis

TABLE 7.5

Techniques for Evaluation by Three Approaches

Approach	Technique		
Pseudo-evaluation	Graphic displays		
	Tabular displays		
	Index numbers		
	Interrupted time-series analysis		
	Control-series analysis		
	Regression-discontinuity analysis		
Formal evaluation	Objectives mapping		
	Value clarification		
	Value critique		
	Constraint mapping		
	Cross-impact analysis		
	Discounting		
Decision-theoretic evaluation	Brainstorming		
	Argumentation analysis		
	Policy Delphi		
	User-survey analysis		

3 (TIGA) PENDEKATAN EVALUASI KEBIJAKAN (Willian W.Dunn, 2003)



Evaluasi Semu,



Evaluasi Formal



Evaluasi Keputusan Teoritis.

3 (TIGA) PENDEKATAN EVALUASI KEBIJAKAN (Willian W.Dunn, 2003)

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-Bentuk Utama
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam- diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	 Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multi atribut

3 (TIGA) PENDEKATAN EVALUASI KEBIJAKAN (Willian W.Dunn, 2003)

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-Bentuk Utama
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam- diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	 Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multi atribut